



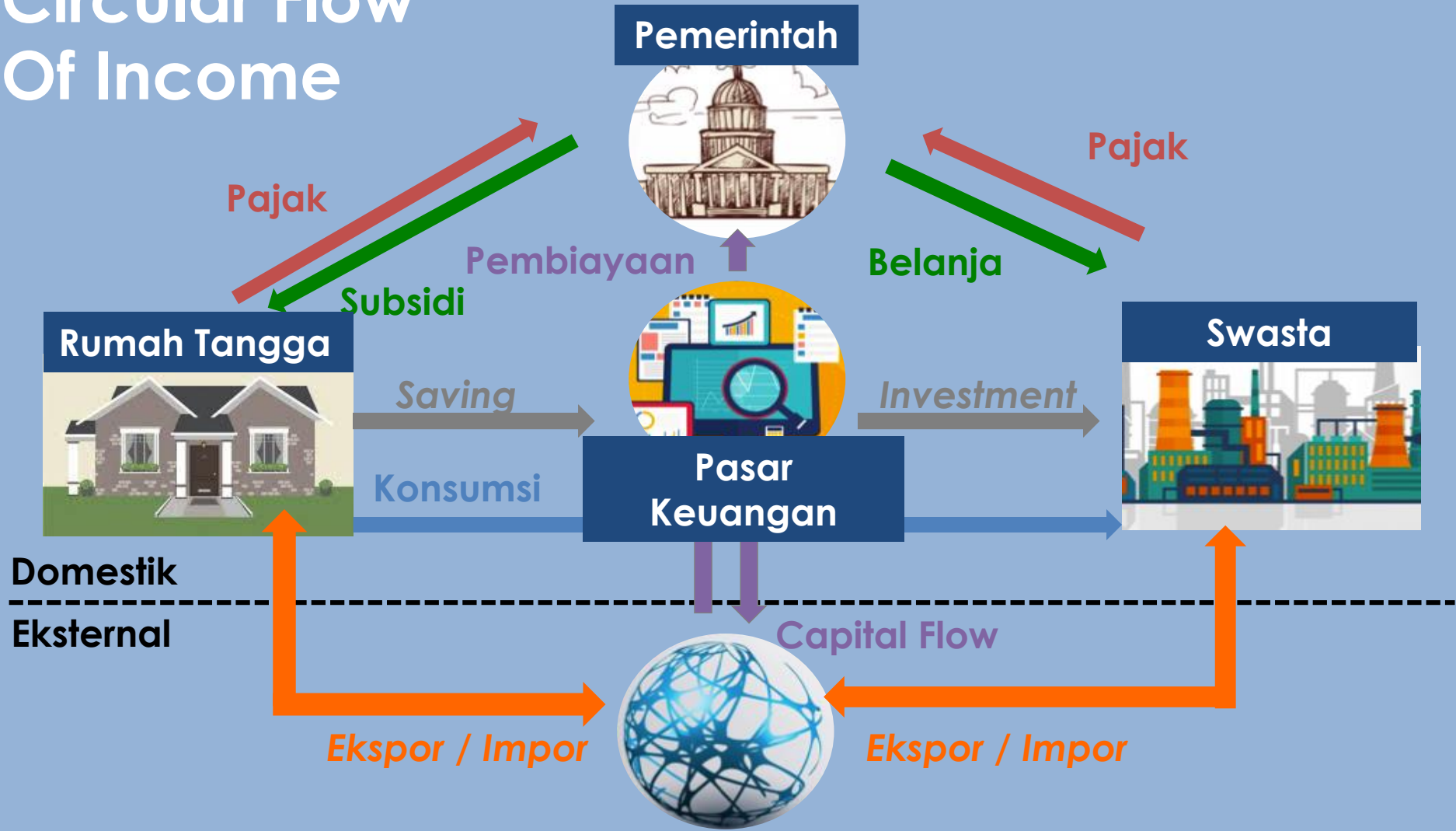
# Diskusi Perekonomian Indonesia Terkini dan Arah Kebijakan Fiskal Indonesia

**Bhayu Purnomo**  
**BKF, Kementerian Keuangan**



- **Bhayu Purnomo**
- TIUI 2001, Lulus 2005
- 2005 – 2006, Departemen Teknik Industri UI
- 2006 – 2009, Credit Analyst, ABN Amro/Royal Bank of Scotland
- 2009 - ... , Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu
  - 2011 MSc in Economics, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
  - 2012 MA in Economics, Georgia State University, Atlanta US
  - Kepala SubBidang Lembaga Rating, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF Kemenkeu

# Circular Flow Of Income





# Update Perekonomian Indonesia

---

BKF, Kementerian Keuangan

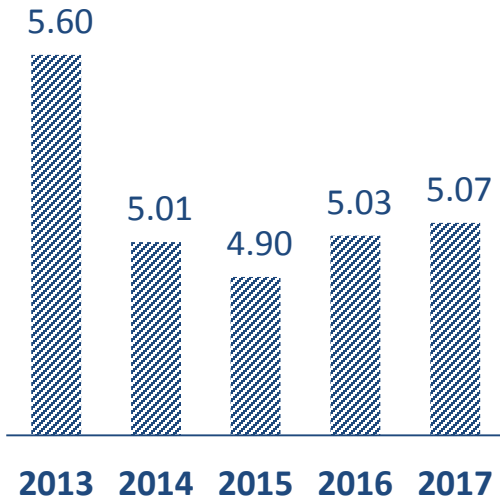




# Pertumbuhan untuk kesejahteraan

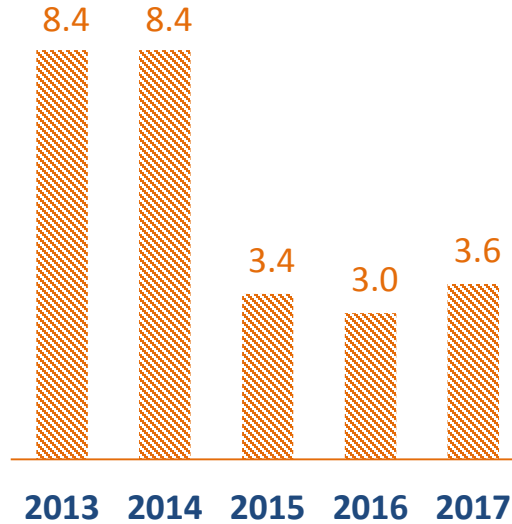
Indikator kesejahteraan Indonesia dalam tren membaik

## Ekonomi terus tumbuh menguat (% yoy)



- Konsumsi stabil
- Pertumbuhan investasi
- Pertumbuhan ekonomi global yang menguat

## Tingkat inflasi yang stabil (% yoy)



- Perbaikan logistik dan distribusi
- Semakin meningkatnya koordinasi kebijakan pengelolaan inflasi

## Perbaikan tingkat kesejahteraan



### Tingkat pengangguran (%)



### Tingkat kemiskinan (%)



### Rasio GINI





# Ekonomi Indonesia masih cukup baik

Didukung stabilnya konsumsi dan tingginya pertumbuhan investasi

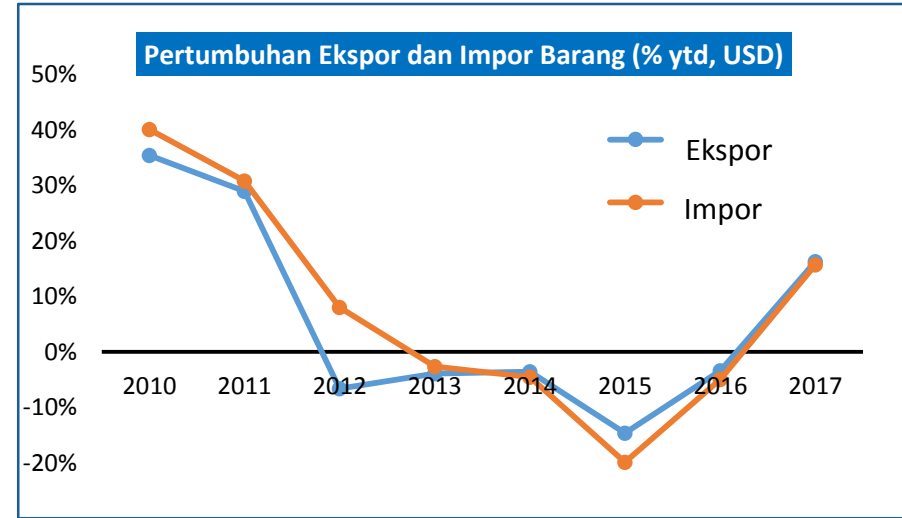
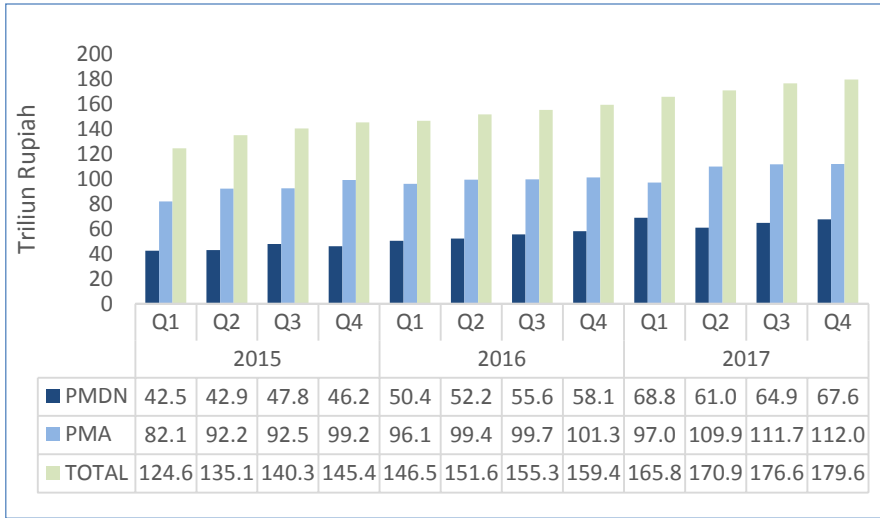
Komponen Pengeluaran (YoY)	2016					2017						2018
	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Porsi	Outlook
<b>Kons Rumah Tangga dan LNPRT</b>	4,98	5,1	5,04	5,03	5,04	5,00	5,02	4,95	4,98	4,98	57,3	5,06
<b>Kons Pemerintah</b>	3,43	6,21	-2,95	-4,03	-0,14	2,69	-1,92	3,48	3,81	2,14	9,1	3,07
<b>PMTB</b>	4,67	4,18	4,24	4,79	4,47	4,77	5,34	7,08	7,27	6,15	32,2	6,90
<b>Ekspor</b>	-3,1	-1,5	-5,75	4,15	-1,57	8,41	2,80	17,01	8,50	9,09	20,4	8,14
<b>Impor</b>	-5,04	-3,47	-4,13	2,72	-2,45	4,81	0,20	15,46	11,81	8,06	19,1	7,87
<b>PDB</b>	<b>4,94</b>	<b>5,21</b>	<b>5,03</b>	<b>4,94</b>	<b>5,03</b>	<b>5,01</b>	<b>5,01</b>	<b>5,06</b>	<b>5,19</b>	<b>5,07</b>		<b>5,4</b>

- **Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT** menunjukkan perbaikan dibandingkan kuartal sebelumnya.
- **Konsumsi Pemerintah** tumbuh positif didorong oleh realisasi belanja barang, belanja pegawai dan bantuan sosial yang
- **PMTB** tumbuh signifikan, tertinggi di periode 2 tahun terakhir. Iklim investasi domestik yang membaik dan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah mendorong peningkatan pertumbuhan investasi
- **Ekspor** tetap tumbuh tinggi didukung oleh ekspor non migas. Kinerja ekonomi negara mitra dagang utama yang cukup baik. **Impor** mampu tumbuh lebih tinggi yang didukung oleh pertumbuhan impor barang modal dan bahan baku.



# Indikator Makroekonomi Stabil dan Positif

Mempunyai potensi yang besar dimasa depan



	Inflasi 2017 (%)	
	YoY	Rata-rata YoY
<b>IHK</b>	<b>3,61</b>	<b>3,81</b>
<i>Core Inflation</i>	2,95	3,15
<i>Administered Price</i>	8,70	8,01
<i>Volatile Food</i>	0,71	1,82

## Pencapaian didukung oleh terkendalinya harga, terutama komoditas pangan di sepanjang tahun

- Kebijakan pemantauan harga dan perbaikan tata niaga komoditas pangan
- Peningkatan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil dalam menjaga pasokan
- Perbaikan koordinasi kebijakan Pusat dan Daerah
- Terjaganya fundamental permintaan dan penawaran tercermin dari stabilnya *core inflation*.



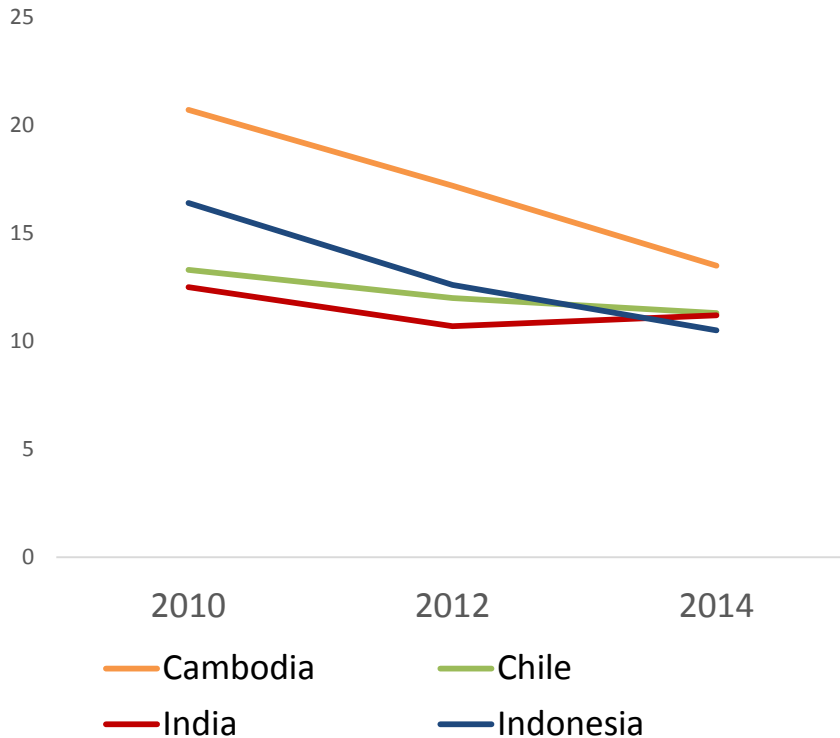
# Pencapaian Indonesia yang lebih baik

Menunjukkan keberpihakan pada kesejahteraan

## Tingkat Kemiskinan

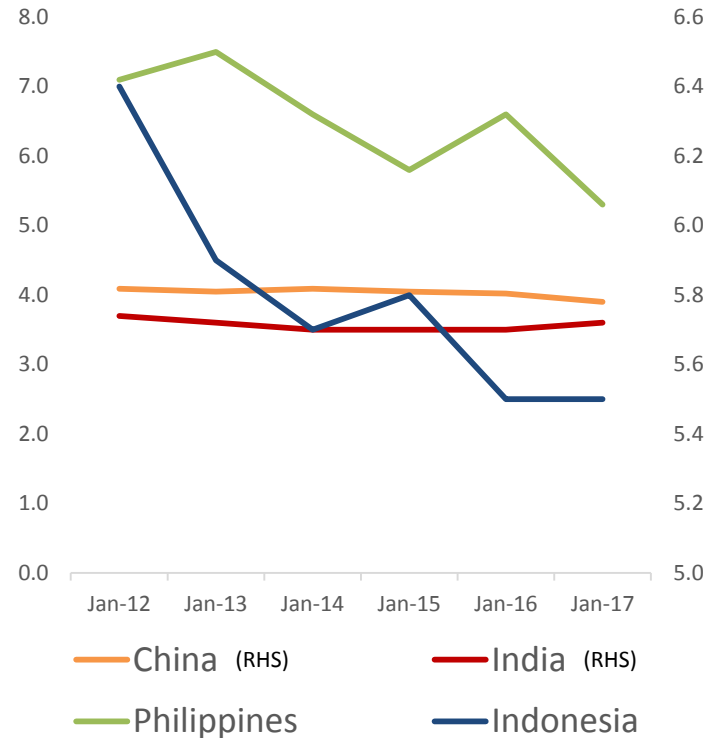
Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population)

Sumber: WDI World Bank



## Tingkat Pengangguran (%)

Sumber: CEIC, BPS



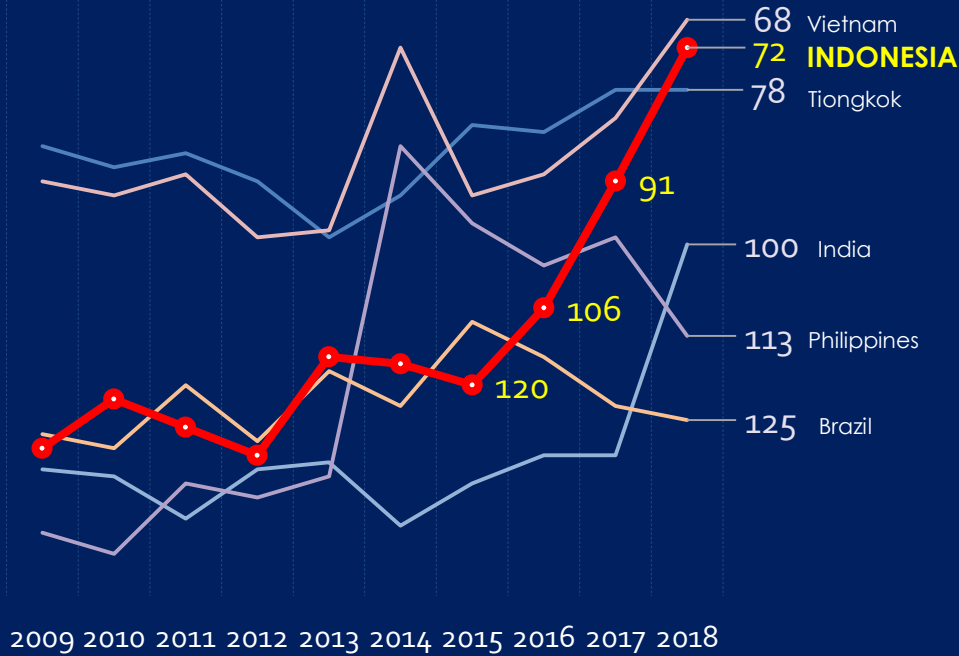




# Kenaikan Tajam Ranking EODB Indonesia Sejak 2015

Semakin mudah melakukan menanamkan investasi dan melakukan

## Ease of Doing Business Rank



**NAIK**  
**19**

Peringkat di 2018

**Score: 66,5**  
(↑4,95)

2017: #91  
2016: #106  
2015: #120

**NAIK**  
**48**

Dalam 4 tahun

## 7 Indikator EODB Indonesia yang mengalami perbaikan di 2018

1. Easier to start business
2. Easier to get electricity
3. Easier to register property
4. Improving the sharing of credit information
5. Strengthening minority investor protections
6. Easier to pay taxes
7. Easier to trade across border



# Berbagai Pengakuan atas Reformasi Ekonomi & Struktural

Creditworthiness, doing business, kepercayaan pada pemerintah



**BBB-**

## Investment Grade dari Standard and Poor's

Indonesia mendapat peringkat investment grade dari seluruh lembaga rating utama: S&P, Moody's dan Fitch, serta JCRA dan R&I. Fitch, Moody's dan JCRA bahkan memberikan peringkat satu notch lebih tinggi dari batas investment grade



**#1**

## Gallup World Poll

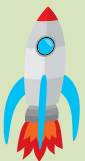
Indonesia bersama dengan Swiss meraih predikat negara dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi kepada Pemerintah



**#2**

## USNews Best Country to Invest

Indonesia memperoleh peringkat 2 untuk negara tujuan investasi menurut USNews



Naik

**5**

peringkat

## Global Competitiveness Index 2017-2018

Posisi Indonesia naik dari 41 menjadi 36 dari 137 negara. 9 dari 12 pilar penilaian mendapatkan kenaikan skor antar lain: Institution (47), Infrastructure (52), macroeconomic (26), health and primary education (94), technological readiness (80), business sophistication (32)



# Tantangan Perekonomian Indonesia

---

BKF, Kementerian Keuangan

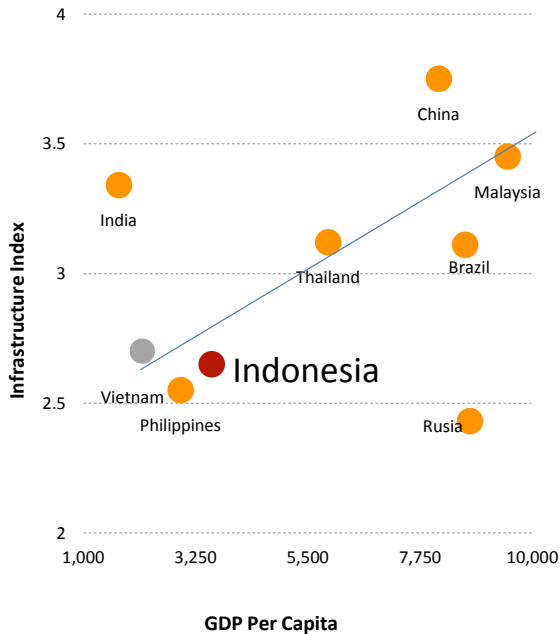




# Tantangan Utama bagi Indonesia

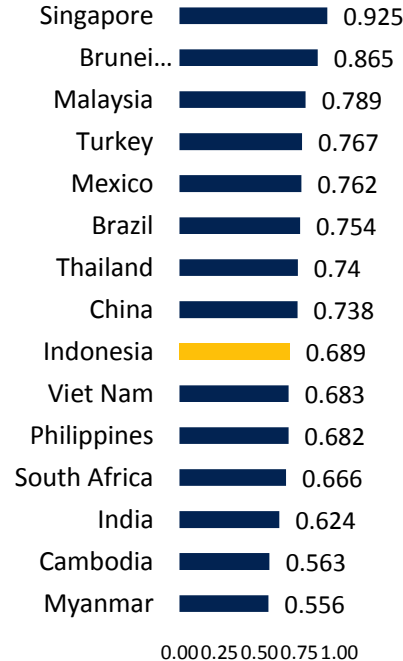
Perbaikan pada Infrastruktur dan kualitas SDM

## Infrastructure Gap

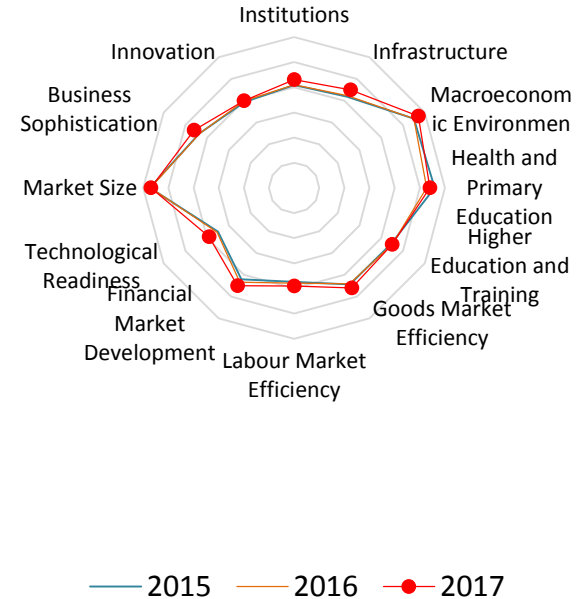


## Human Capital Quality

Comparison of Human Development Index 2015



## Ease of Doing Business



## Tantangan pertumbuhan ekonomi global

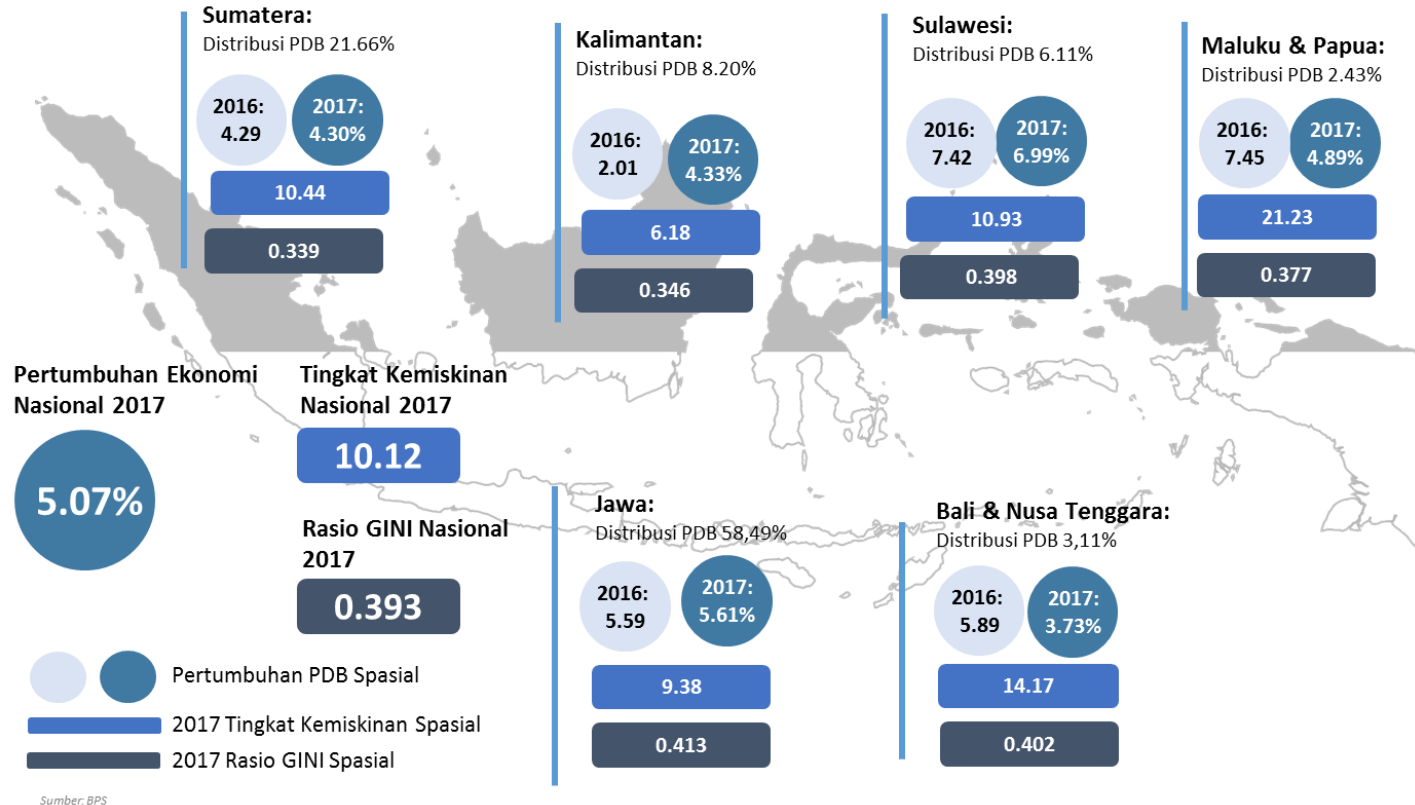
Ekonomi Tiongkok yang melanjutkan moderasi, pembalikan kebijakan moneter di negara maju, risiko geopolitik



# Aktivitas ekonomi terpusat di Pulau Jawa

Konektivitas dan transportasi menjadi tantangan

- Ekonomi masih berpusat di Indonesia bagian Barat
- Pengaruh harga komoditas pada perekonomian masih tinggi di beberapa daerah (Sumatera & Kalimantan)
- Tingkat kemiskinan masih tinggi di bagian Timur Indonesia

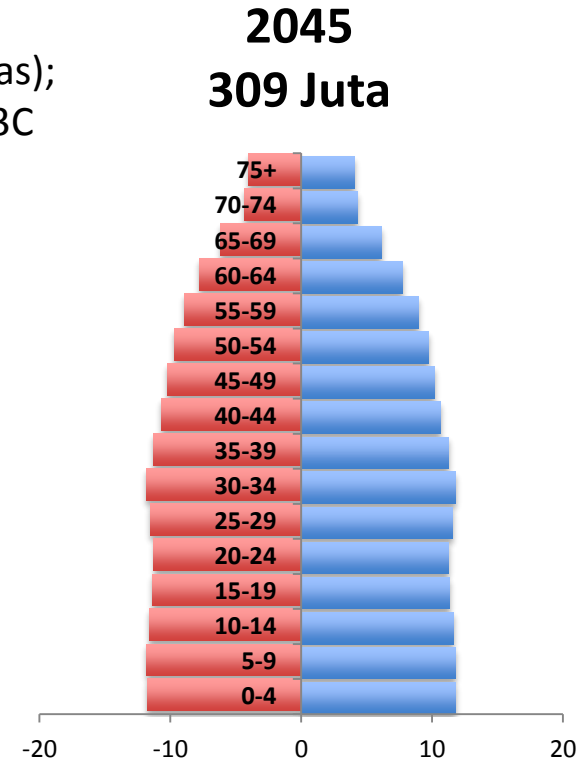
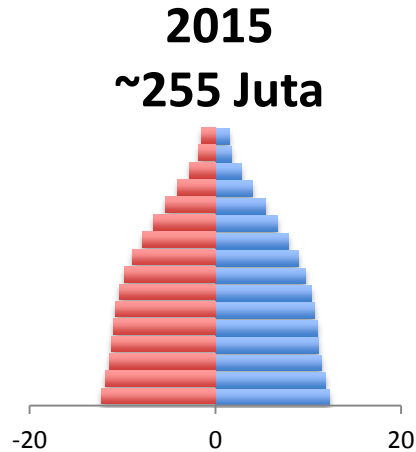




# Populasi Indonesia diproyeksikan 309 juta jiwa

Porsi usia produktif yang tinggi

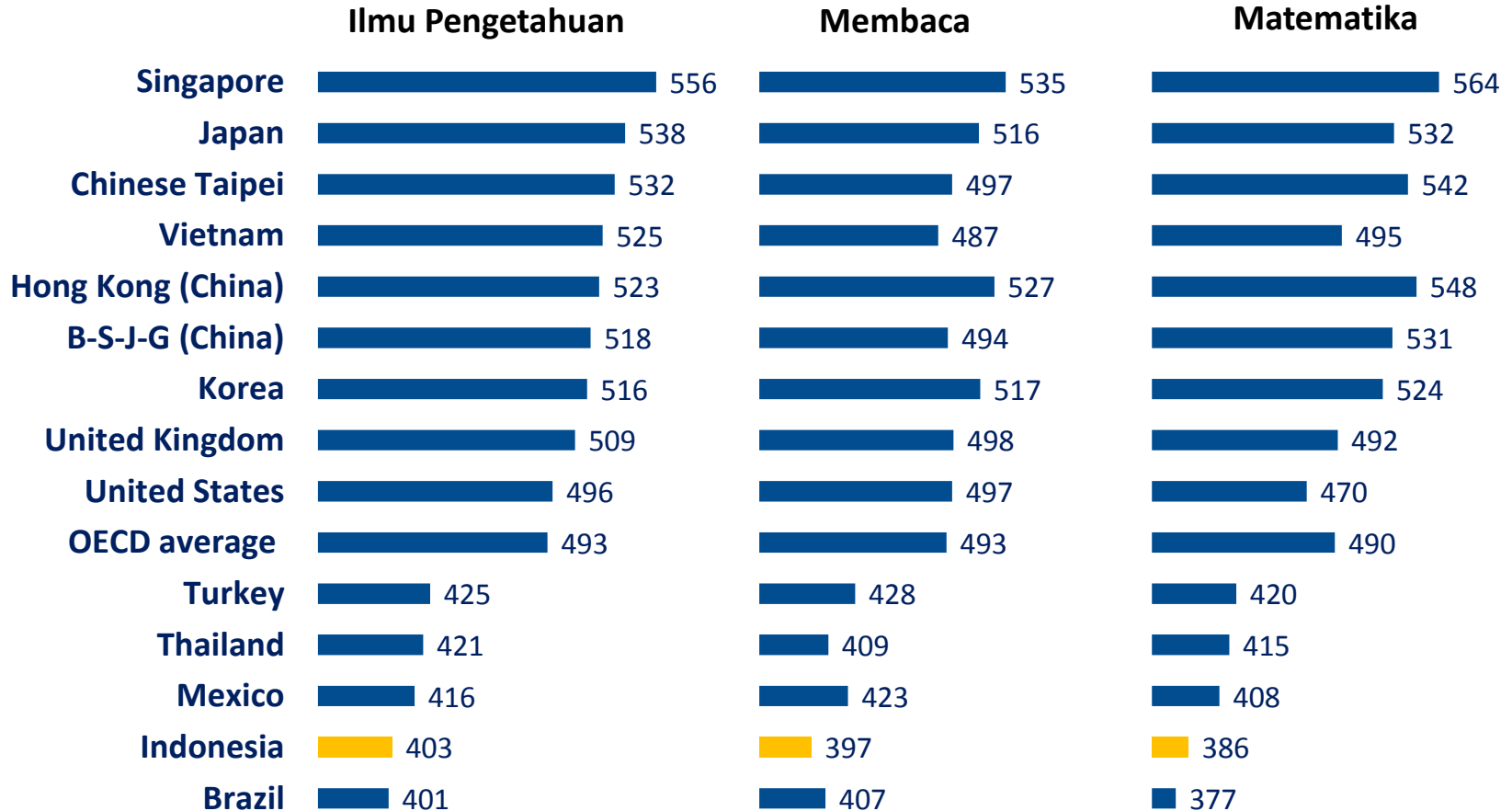
- Populasi muda (millenials dan Gen- Y) meningkat;
- Urbanisasi terjadi, masyarakat tinggal di perkotaan (urban areas);
- Karakteristik Penduduk yang masuk kategori urban millenials :3C (Creative, Confidence, Connected), merupakan potensi bagi tumbuhnya sektor industri kreatif di masa mendatang





# Kualitas SDM juga perlu ditingkatkan

PISA score indonesia masih jauh dibanding negara lain



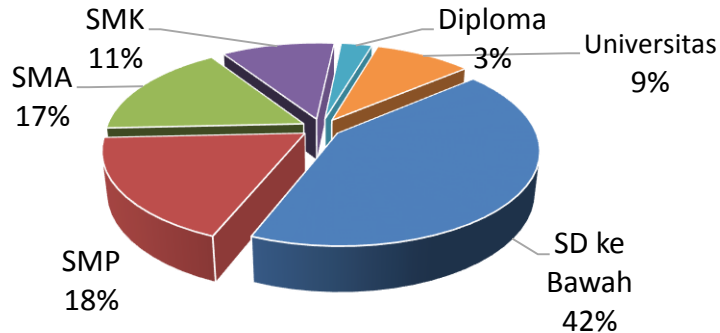
Source : OECD



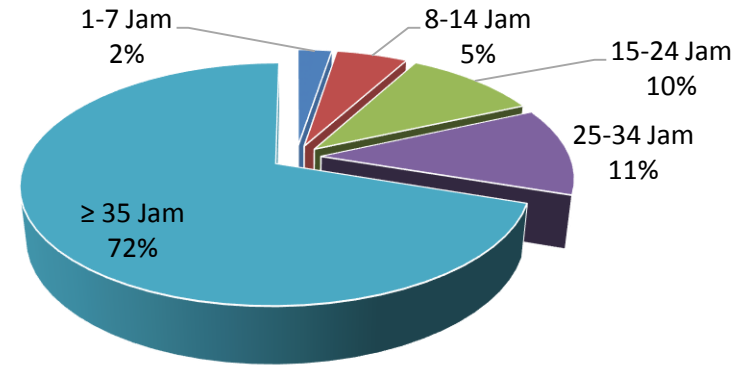
# Mayoritas tenaga kerja berpendidikan rendah

Tenaga kerja pendidikan SD & SMP mendominasi sebesar 60 persen

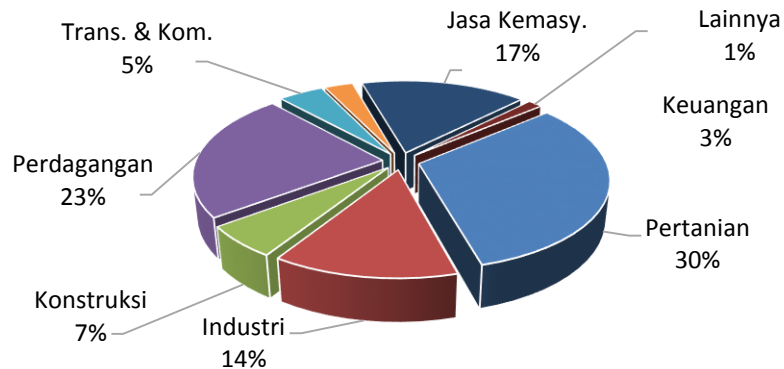
## Tenaga Kerja Menurut Pendidikan (Juta Orang)



## Tenaga Kerja Menurut Jam Kerja (Juta Orang)



## Tenaga Kerja Menurut Sektor (Juta Orang)



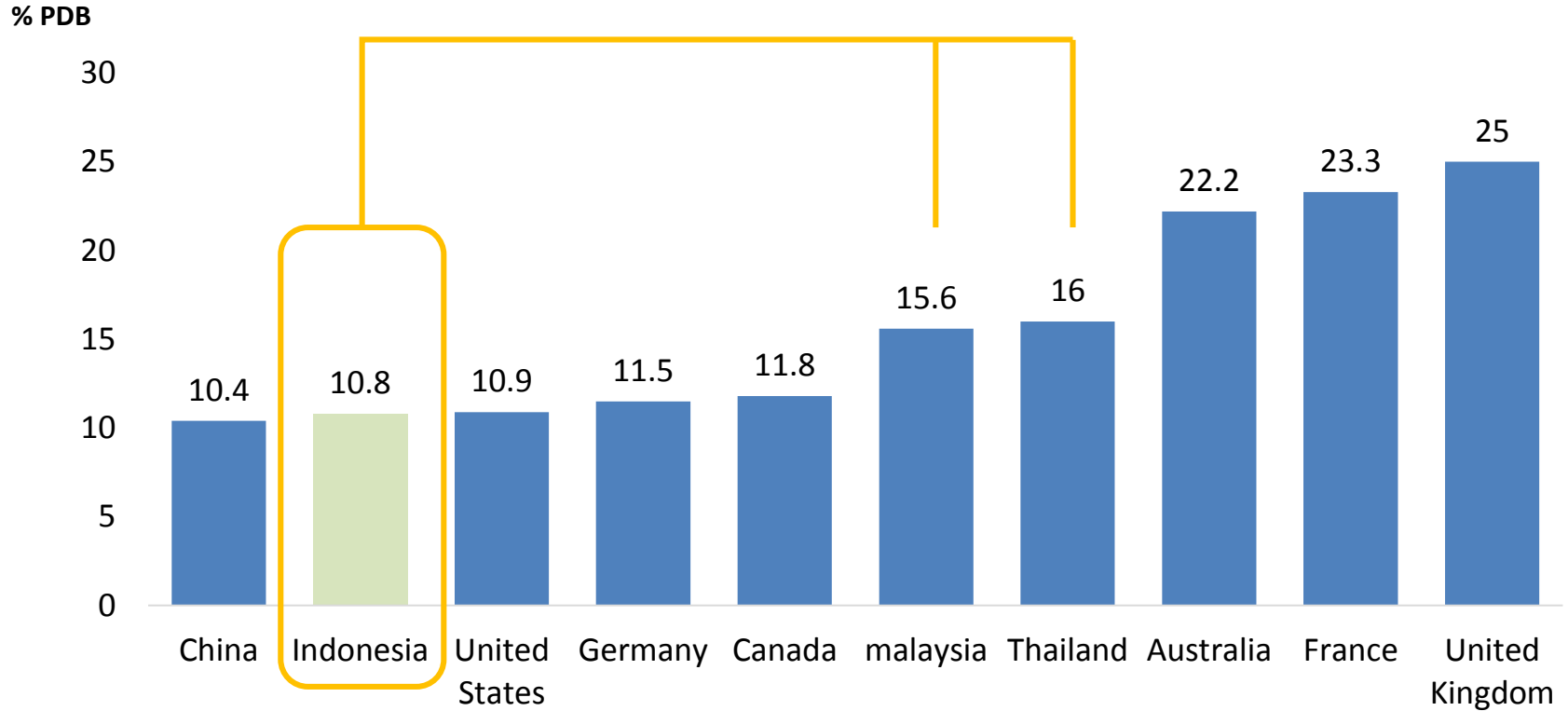
- Kualitas pekerja yang rendah ditunjukkan oleh tingkat pendidikan yang juga rendah.
  - ✓ Menyebabkan daya saing tenaga kerja Indonesia masih lebih lemah
  - ✓ Indonesia tidak dapat mengandalkan *labor intensive* lagi dalam jangka panjang karena *labor cost* yang semakin meningkat.
- Sektor pertanian mengalami penurunan porsi tenaga kerja, sedangkan di sektor industri relatif stagnan. Tenaga kerja ke sektor primer *shifting* ke sektor jasa.





# Rendahnya Rasio Penerimaan Perpajakan

Mempengaruhi kapasitas belanja APBN





# Langkah Kebijakan Pemerintah

---

BKF, Kementerian Keuangan



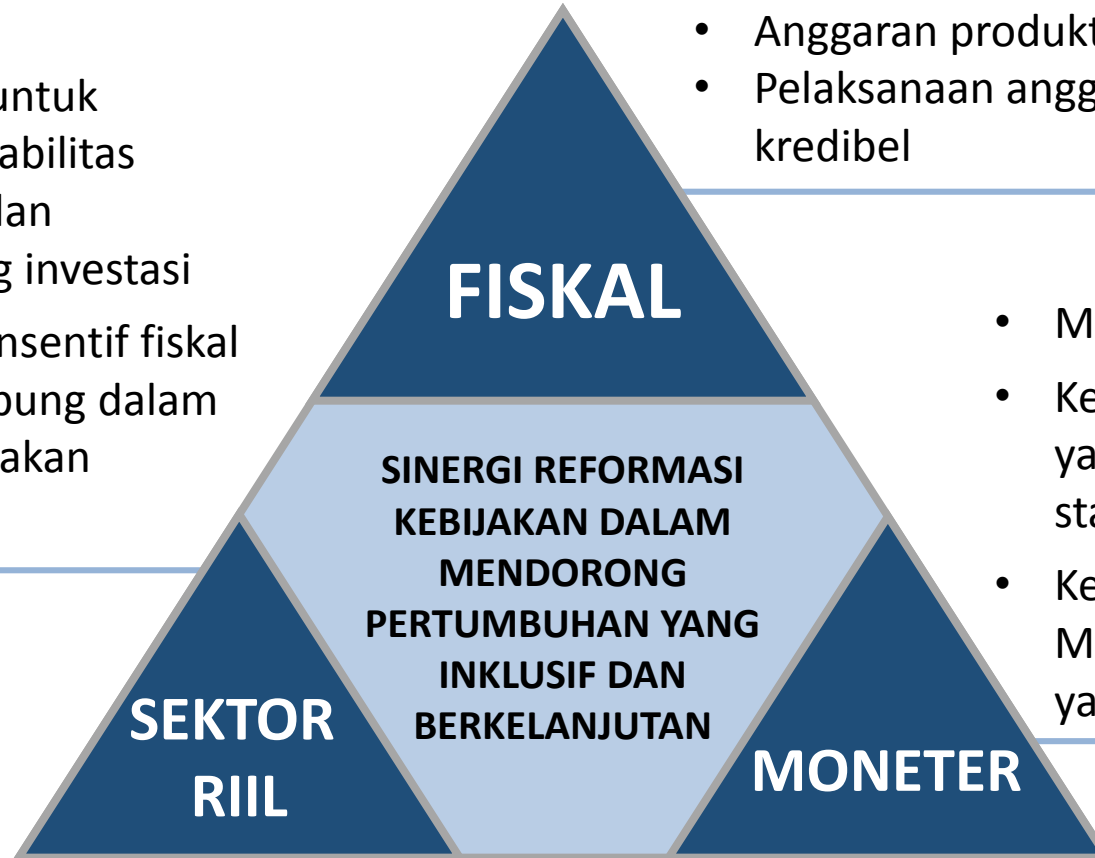


# Sinergi Kebijakan di Semua Sektor

Menciptakan pertumbuhan inklusif untuk mengatasi tantangan pembangunan

- Kebijakan untuk menjaga stabilitas konsumsi dan mendorong investasi
- Termasuk insentif fiskal Yang tergabung dalam Paket Kebijakan Ekonomi

- Anggaran produktif dan realistis
- Pelaksanaan anggaran yang kredibel



- Manajemen inflasi
- Kebijakan moneter yang mendukung stabilitas
- Kebijakan Makroprudensial yang akomodatif



# Kebijakan Fiskal dan APBN adalah Tulang Punggung Reformasi Ekonomi

Diintegrasikan dengan reformasi kebijakan di sektor lainnya

Optimalisasi  
**Penerimaan  
Negara**



**Belanja Negara**  
yang Produktif dan  
Berkualitas



Pengelolaan  
**Pembiayaan** yang  
Pruden/hati-hati

**APBN yang kredibel, efisien dan efektif,  
serta berkesinambungan**

**Stimulus yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi**

# Investasi Melalui APBN

ALOKASI

DISTRIBUSI

STABILITASI

## Sumber Daya Manusia

- Pendidikan
- Penguasaan teknologi
  - Kesehatan
- Agama, Budi pekerti



## Infrastruktur

- Konektivitas
- Produktivitas
- Mobilitas

## Institusi

- Birokrasi yang efisien
- Perang terhadap korupsi
- Peran Pemerintah Daerah

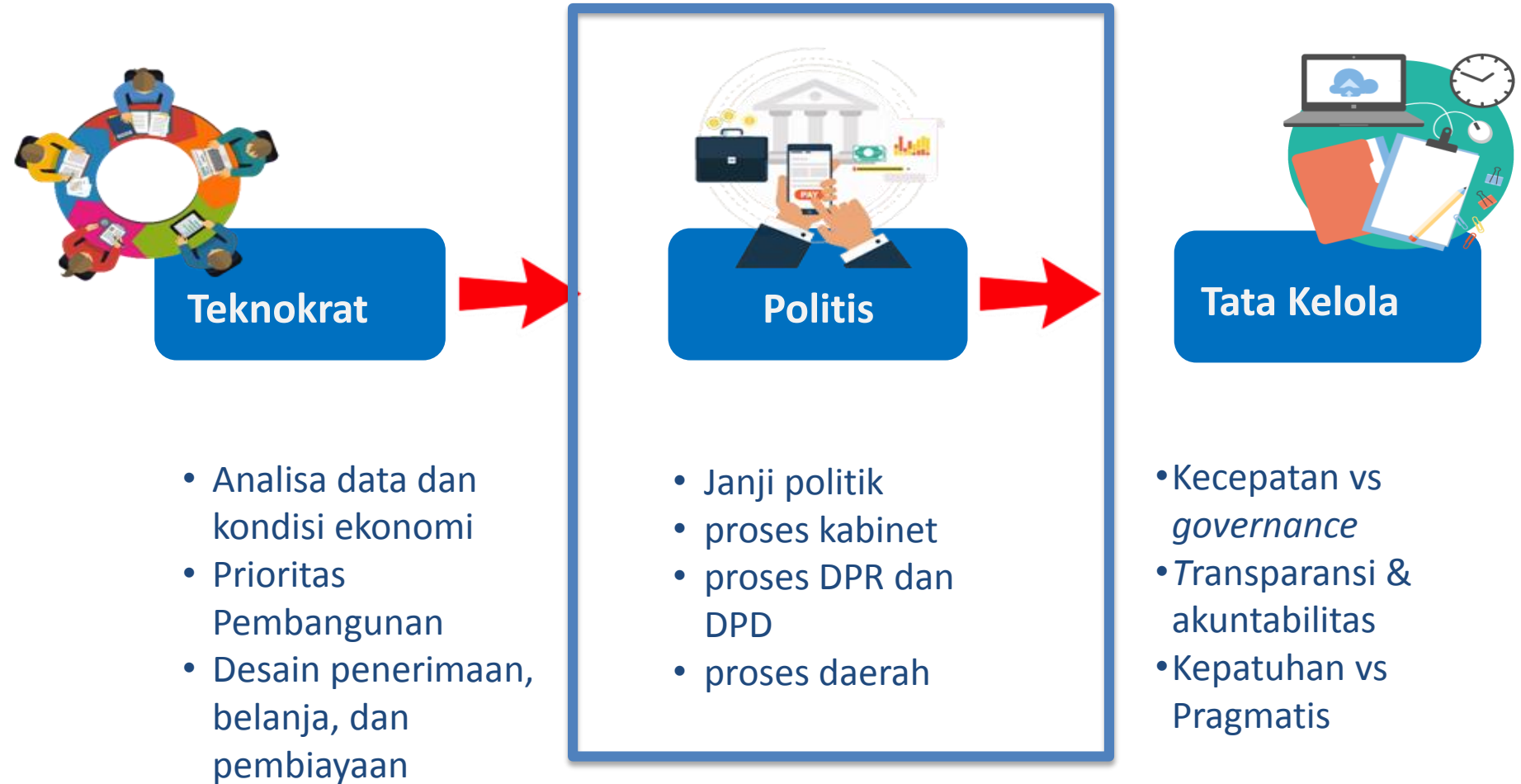




## SETIAP NEGARA MEMPUNYAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA.

- Anggaran digunakan untuk mendorong perkembangan ekonomi **(SEKALIGUS)** untuk *deliver* janji kampanye.
- Dalam struktur penganggaran Indonesia, ada anggaran yang tingkatnya **Negara (APBN)** dan anggaran yang tingkatnya di **Pemda (APBD Prov, APBN Kab/Kota, APBDes)**.
- Pembagian sumber pendapatan dan kategori belanja diatur pada **UU Keuangan Negara**.
- Anggaran harus **realistis dan kredibel** untuk dapat diterima oleh masyarakat dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah (Pusat/Daerah) yang berjalan.
- **Kebijakan Fiskal** berkaitan dengan pengelolaan Penerimaan dan Belanja negara.
- Kapasitas fiskal Indonesia perlu terus ditingkatkan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan untuk mencapai **masyarakat yang adil dan sejahtera**.
- **Perbaikan terus dilakukan** melalui optimalisasi pendapatan, peningkatan efisiensi belanja, dan sinergi pendanaan pembangunan pusat-daerah maupun pemerintah-swasta
- Pengelolaan anggaran negara perlu dikendalikan pada batasan yang aman, hati-hati, dan terukur sehingga **memiliki risiko yang terkendali**.

# Sinergi Proses Penyusunan APBN Melibatkan Semua Pihak





# Asumsi Makroekonomi

Dasar dari penyusunan APBN

## Pertumbuhan Ekonomi (%)

2017 : 5.05\* (Outlook)  
2018 APBN : 5.4

## Nilai Tukar (Avg.)

2017 : 13,384  
2018 APBN : 13,400

## Inflasi (% , yoy)

2017 : 3.6  
2018 APBN : 3.5

## Lifting Minyak

(ribu barel/hari)

2017 : 803,3 (Outlook)  
2018 APBN : 800

## Lifting Gas

(setara ribu barel/hari)

2017 : 1,140 (Outlook)  
2018 APBN : 1,200

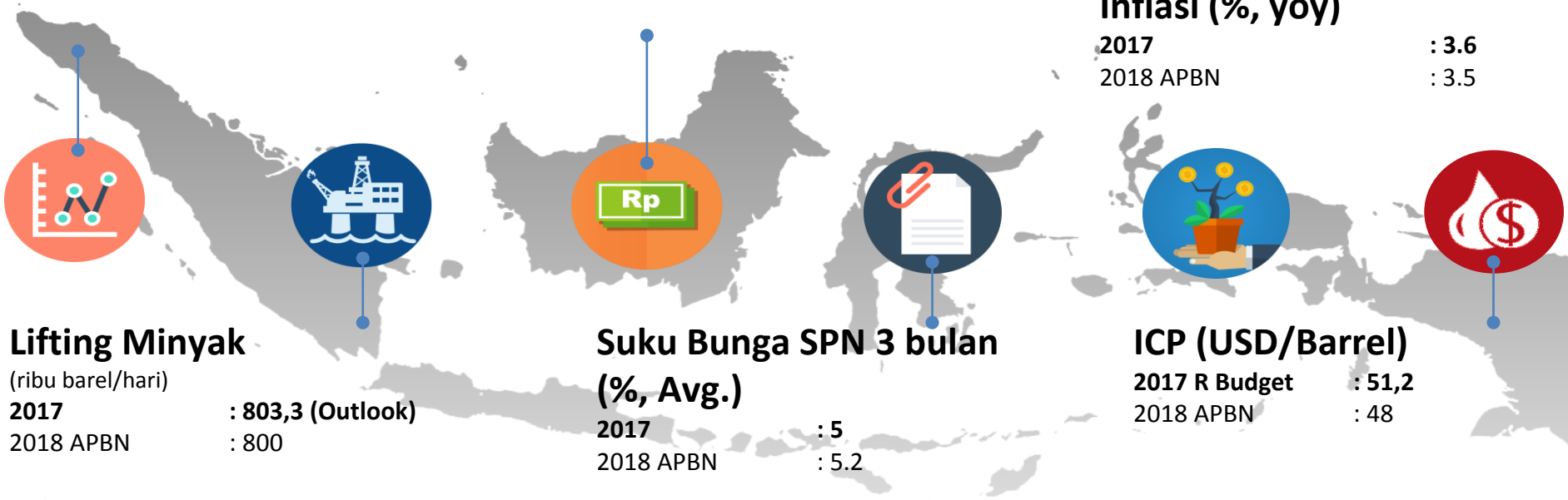
## Suku Bunga SPN 3 bulan

(%, Avg.)

2017 : 5  
2018 APBN : 5.2

## ICP (USD/Barrel)

2017 R Budget : 51,2  
2018 APBN : 48





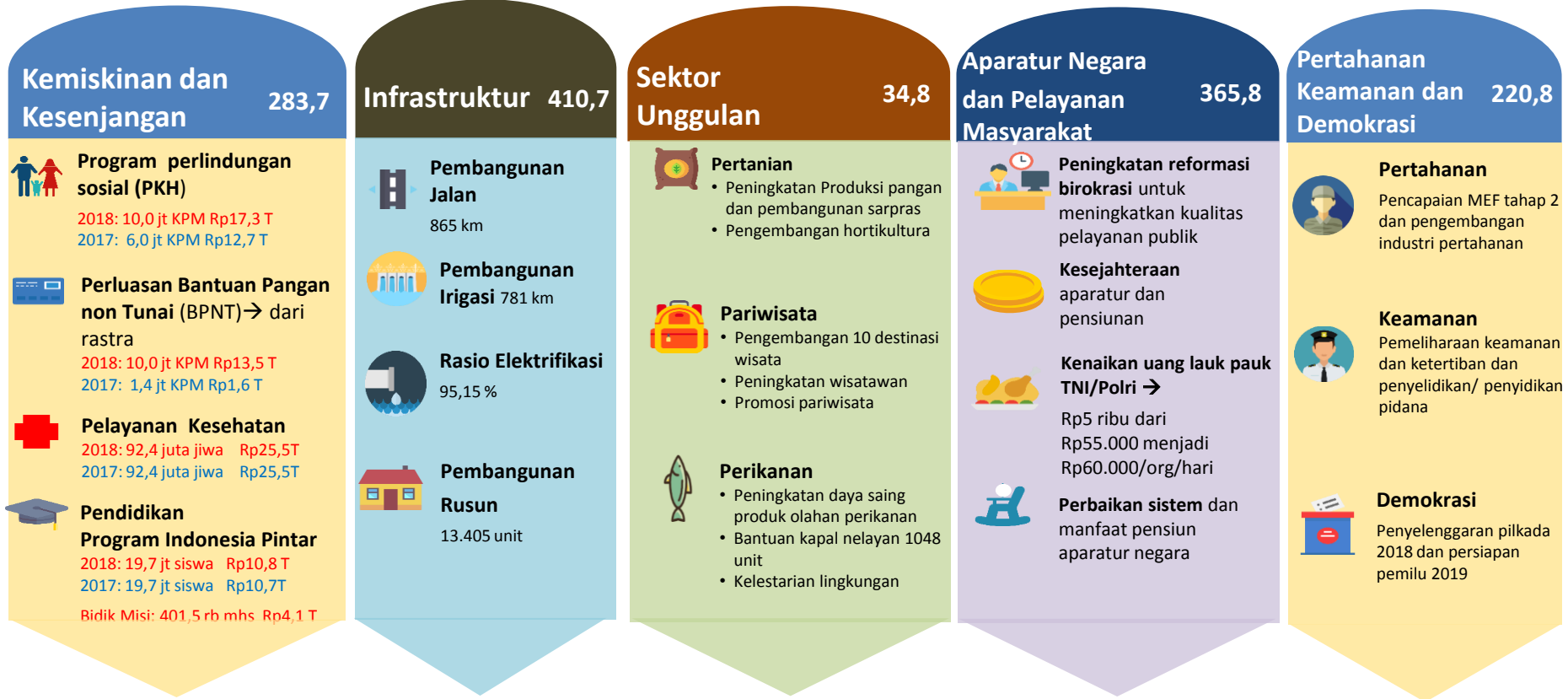
# Ringkasan Pelaksanaan APBN 2017 (Run 30 Januari 2018)

APBN (triliun Rupiah)	2016				2017			
	APBNP	LKPP Audited	% thd APBNP	growth (%)	APBNP	Realisasi	% thd APBNP	growth (%)
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>1.786,2</b>	<b>1.555,9</b>	<b>87,1</b>	<b>3,2</b>	<b>1.736,1</b>	<b>1.665,2</b>	<b>95,9</b>	<b>7,0</b>
<b>I. PENDAPATAN DALAM NEGERI</b>	<b>1.784,2</b>	<b>1.546,9</b>	<b>86,7</b>	<b>3,4</b>	<b>1.733,0</b>	<b>1.655,5</b>	<b>95,5</b>	<b>7,0</b>
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.539,2	1.285,0	83,5	3,6	1.472,7	1.343,6	91,2	4,6
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	245,1	262,0	106,9	2,5	260,2	311,9	119,8	19,0
<b>II. PENERIMAAN HIBAH</b>	<b>2,0</b>	<b>9,0</b>	<b>455,0</b>	<b>(24,9)</b>	<b>3,1</b>	<b>9,7</b>	<b>312,9</b>	<b>8,2</b>
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	<b>2.082,9</b>	<b>1.864,3</b>	<b>89,5</b>	<b>3,2</b>	<b>2.133,3</b>	<b>2.001,6</b>	<b>93,8</b>	<b>7,4</b>
<b>I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>1.306,7</b>	<b>1.154,0</b>	<b>88,3</b>	<b>(2,5)</b>	<b>1.367,0</b>	<b>1.259,6</b>	<b>92,1</b>	<b>9,2</b>
1. Belanja K/L	767,8	684,2	89,1	(6,5)	798,6	757,7	94,9	10,7
2. Belanja Non K/L	538,9	469,8	87,2	4,1	568,4	501,9	88,3	6,8
<b>II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA</b>	<b>776,3</b>	<b>710,3</b>	<b>91,5</b>	<b>14,0</b>	<b>766,3</b>	<b>742,0</b>	<b>96,8</b>	<b>4,5</b>
1. Transfer ke Daerah	729,3	663,6	91,0	10,2	706,3	682,2	96,6	2,8
2. Dana Desa	47,0	46,7	99,4	124,8	60,0	59,8	99,6	28,0
<b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b>	<b>(105,5)</b>	<b>(125,6)</b>	<b>119,0</b>	<b>(11,9)</b>	<b>(178,0)</b>	<b>(119,8)</b>	<b>67,3</b>	<b>(4,6)</b>
<b>D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)</b>	<b>(296,7)</b>	<b>(308,3)</b>	<b>103,9</b>	<b>3,3</b>	<b>(397,2)</b>	<b>(336,4)</b>	<b>84,7</b>	<b>9,1</b>
<i>% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB</i>	<b>(2,35)</b>	<b>(2,49)</b>			<b>(2,92)</b>	<b>(2,48)</b>		
<b>E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II + III + IV + V)</b>	<b>296,7</b>	<b>334,5</b>	<b>112,7</b>	<b>3,5</b>	<b>397,2</b>	<b>361,9</b>	<b>91,1</b>	<b>8,2</b>
<b>I. PEMBIAYAAN UTANG</b>	<b>371,6</b>	<b>403,0</b>	<b>108,5</b>	<b>5,8</b>	<b>461,3</b>	<b>423,7</b>	<b>91,8</b>	<b>5,1</b>
<b>II. PEMBIAYAAN INVESTASI</b>	<b>(94,0)</b>	<b>(89,1)</b>	<b>94,8</b>	<b>49,3</b>	<b>(59,7)</b>	<b>(59,8)</b>	<b>100,0</b>	<b>(32,9)</b>
<b>III. PEMBERIAN PINJAMAN</b>	<b>0,5</b>	<b>1,7</b>	<b>360,2</b>	<b>10,5</b>	<b>(3,7)</b>	<b>(1,4)</b>	<b>38,4</b>	<b>(184,6)</b>
<b>IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN</b>	<b>(0,7)</b>	<b>(0,7)</b>	<b>100,0</b>	<b>n.a.</b>	<b>(1,0)</b>	<b>(1,0)</b>	<b>100,0</b>	<b>54,3</b>
<b>V. PEMBIAYAAN LAINNYA</b>	<b>19,3</b>	<b>19,6</b>	<b>101,2</b>	<b>5.624,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>120,6</b>	<b>(98,2)</b>
<b>KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,0</b>	<b>26,2</b>			<b>0,0</b>	<b>25,5</b>		



# Dukungan APBN untuk mewujudkan Nawacita

Melalui belanja Pemerintah Pusat yang lebih berkualitas



● APBN 2018      ● Real. Sementara 2017

(triliun rupiah)



# Infrastruktur untuk pemerataan dan konektivitas

Mengejar ketertinggalan (gap) Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur.



Copyright freepik.com @Vectorarte



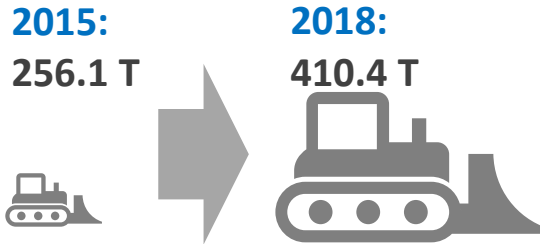
# Belanja produktif untuk infrastruktur

Meningkatkan produktivitas dan mengatasi kesenjangan antar daerah

## INFRASTRUKTUR UNTUK DAYA SAING

- Produktifitas, konektifitas, aksesabilitas dan mobilitas
- Dukungan pendanaan tidak hanya dari APBN tetapi juga melalui BUMN dan keterlibatan sektor swasta
- Tantangan dalam mengundang lebih banyak keterlibatan sektor swasta

### Anggaran Infrastruktur



### Pembangunan dan Preservasi Jalan

- Pembangunan Jalan Baru **865 km**
- Pembangunan jalan tol **25 km**
- Pembangunan Jembatan **8.695 m**



### Pembangunan jalur KA **620 km'sp**



### Pembangunan LRT (lanjutan) **23 km'sp**



### Pembangunan bandara baru **8 lokasi (penyelesaian dan lanjutan)**



### Informasi dan Telekomunikasi

- Pembangunan desa *broadband* terpadu **100 lokasi**
- Pembangunan BTS didaerah *blankspot*, terutama daerah 3T **380 lokasi**



### Penyediaan dan Peningkatan kualitas Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

- Pembangunan Rusun **13.405 unit**
- Bantuan Stimulan (peningkatan/ pembangunan) **180,0 ribu unit**

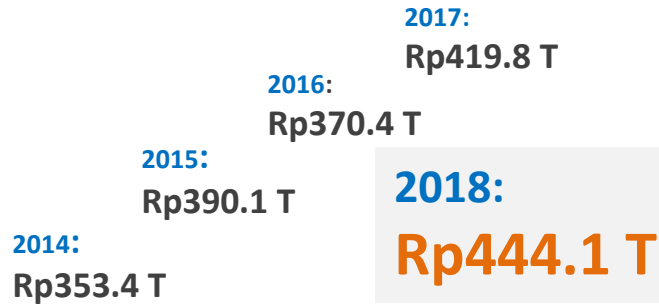
Pemerintah telah menyiapkan berbagai skema untuk menarik peran swasta untuk berkontribusi pada investasi di Infrastruktur (Revolving Fund (o/w. FLPP), PT SMI & PT IIF, PT IIGF, Subsidiary Loan Agreement, Penjaminan, PMN pada BUMN).



# Komitmen APBN untuk peningkatan SDM

Memastikan alokasi 20% untuk pendidikan dan 5% untuk kesehatan

## Alokasi Pendidikan



	Program Indonesia Pintar	19,7 Jt Siswa
	Bantuan Operasional Sekolah	56 Jt Siswa
	Bidik Misi	401,5 Rb Siswa
	Perbaikan Sekolah	61,2 Ribu
	Tunjangan Guru	1.8 Jt Guru

Pemerataan akses dan kualitas pendidikan, penguatan vokasional serta penguatan SWF Pendidikan

## Alokasi Kesehatan








	Program Indonesia Sehat	92,4 Jt Orang
	Fasilitas Keluarga Berencana	1,8 Jt Orang
	Perbaikan Fasilitas Kesehatan	49 Faskes
	Program Imunisasi Bayi	92,5%
	Sertifikasi Makanan dan Obat	74 jt

meningkatkan supply side dan layanan, upaya kesehatan promotif preventif, serta menjaga keberlanjutan JKN



# Fokus belanja APBN untuk kesejahteraan

Melalui penyusunan kebijakan belanja sosial yang terarah

APBN 2018 untuk kemiskinan dan ketimpangan <b>Rp297.8 triliun</b>	 Program Keluarga Harapan (PKH)	 Program Bantuan Pangan	 Program Indonesia Pintar	 Asuransi Kesehatan (JKN)	 Dana Desa
<b>2017 (realisasi)</b>	Rp12.5 T	Rp20.5 T	Rp10.7 T	Rp25.5 T	Rp59.8 T
<b>2018 (target)</b>	Rp17.3 T  10 juta rumah tangga	Rp20.8 T  15.6 juta rumah tangga	Rp10.5 T  19.7 juta rumah tangga	Rp25.8 T  92.4 juta rumah tangga	Rp60.0 T  74.958 desa



# Kesimpulan



**Fundamental Ekonomi** Masih Terjaga Dengan Baik ditandai dengan pertumbuhan yang sehat, stabilitas harga, posisi eksternal yang membaik



**Sinergi kebijakan** akan terus ditingkatkan untuk mencapai pertumbuhan inklusif dan menghadapi tantangan domestik dan global. APBN merupakan salah satu instrument utama untuk mendukung pertumbuhan inklusif



**Kapasitas fiskal** untuk pendanaan pembangunan masih terbatas dan akan **terus ditingkatkan** termasuk dalam **APBNP 2017 dan RAPBN 2018**, antara lain melalui optimalisasi pendapatan, peningkatan efisiensi belanja, dan sinergi pendanaan pembangunan pusat-daerah maupun pemerintah-swasta



**Defisit** akan dikendalikan pada batasan yang **aman**, serta melanjutkan pengelolaan **Utang** Pemerintah secara **profesional, hati-hati, dan terukur** sehingga memiliki risiko yang terkendali.



Terima Kasih

